

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KRISIS KESEHATAN:
TANTANGAN, RESPONS ANGGOTA WTO DAN PROSPEK PENGUATAN
SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL**

Devi Widyasari Silaban dan Fachrudin Sembiring

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan adalah proses yang berkelanjutan yang selalu terjadi secara teratur. Dalam kasus fenomena parsial tiba-tiba muncul terutama masalah kesehatan, itu akan mempengaruhi perdagangan dalam hal rantai pasokan barang, tetapi tidak pernah menunda distribusi sepenuhnya. Anggota WTO secara responsif dan sementara menerapkan tindakan yang menghalangi perdagangan. Seiring berjalannya waktu, tindakan unilateral dapat diambil terlepas dari kewajiban anggota untuk membuka akses pasar sebagai prinsip inti dalam aturan WTO. Artikel ini akan membahas bagaimana anggota memenuhi kewajiban mereka selama masalah kesehatan dengan memberlakukan tindakan tertentu; dan bagaimana tindakan unilateral dapat memperkuat sistem perdagangan multilateral dan menciptakan liberalisasi perdagangan pada tahap berikutnya. Artikel ini akan ditulis sesuai dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis sebagai gagasan utama dari proses analisis. Artikel ini akan menampung gagasan konseptual yang didasarkan pada aturan WTO dan merefleksikan fenomena dalam skala ekonomi lebih lanjut untuk mempertahankan perdagangan yang sedang berlangsung oleh anggota. Setelah itu, anggota dapat merespon dengan benar setiap masalah kesehatan yang terkait dengan rantai distribusi barang. Dengan memberlakukan tindakan yang dapat diakui kepada anggota WTO secara kolektif.

Kata Kunci: Anggota WTO, Tindakan Unilateral, Masalah Kesehatan, Sistem Perdagangan Multilateral, Peraturan WTO

ABSTRACT

Trade is a sustainable process that occurs regularly. If sudden health issues emerge, such as Covid-19, it will affect the trade of goods supply chain, but never postpone entirely. WTO members responsively and temporarily impose measures that somehow barriers trade. As time goes by, unilateral measures can be taken regarding members' obligation to open market access as a core principle within WTO. This paper will discuss how members comply with their obligation during Covid-19 by imposing measures; and how unilateral measures can reinforce the multilateral trading system and create trade liberation later. This paper will be written according to normative-juridical methods with a historical approach as the main idea of the analysis process. This paper will accommodate conceptual ideas upon Rules and re-forecasting phenomenon in further economic scale to maintaining ongoing trade. Afterward, members may respond appropriately to health issues relating to the goods supply chain by imposing measures that can be acknowledged to members collectively.

Keywords: WTO Members, Unilateral Measures, Health Issues, Multilateral Trading System, WTO Rules

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, perdagangan adalah tindakan ekonomi, yang diatur oleh hukum yang komprehensif dan dioperasikan setiap hari oleh ideologi politik yang berbeda. Setiap negara pasti mengetahui jika perdagangan memainkan peran krusial dalam perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan secara statis atau praktis bahwa perdagangan selalu menjadi masalah sentral dari dalam pergaulan internasional. Hal ini dikarenakan perdagangan melibatkan banyak negara yang terhubung sebagai sistem yang terus menerus berjalan. Lebih lanjut, setiap negara akan mengambil peran yang mungkin memberi mereka akses ke perdagangan baik regional atau jangkauan multilateral.

Berbicara tentang perdagangan multilateral atau dikenal sebagai sistem perdagangan multilateral, mayoritas negara-negara di seluruh dunia telah menjadi anggota WTO, yang merupakan Organisasi Perdagangan Dunia. WTO mewakili sekitar 90% dari total transaksi ekonomi dunia.¹ WTO memiliki serangkaian aturan yang menyediakan peluang setiap anggota untuk memperluas akses pasar. Untuk memastikan aturan akan berjalan sebagaimana mestinya. WTO menegaskan beberapa prinsip perdagangan yang menjadi syarat bagi setiap keanggotaan WTO untuk dijalankan secara simultan.²

Mengenai prinsip-prinsip WTO, salah satunya anggota harus menjamin adanya akses pasar yang luas. Secara historis, akses pasar menjadi alasan utama mengapa anggota telah setuju untuk mengambil bagian secara keseluruhan dalam negosiasi jangka panjang.³ Walaupun, dalam keadaan perdagangan normal, anggota akan menghadapi hambatan, yang dikenakan oleh anggota lain karena adanya perbedaan interpretasi yang menyebabkan adanya proteksionisme dagang. Hal itu merupakan praktik umum perdagangan yang dapat diselesaikan oleh anggota setiap anggota. Dalam skema rata-rata, hambatan yang melibatkan anggota satu sama lain hanya terjadi sebagian jika anggota membutuhkannya dengan pertimbangan yang berbeda.

Dalam skema tertentu, anggota jarang memberlakukan tindakan perdagangan secara kolektif sambil menangani masalah serupa yang dapat merusak perdagangan. Masalah kesehatan dapat menjadi alasan untuk hambatan potensial. Masalah kesehatan

¹ WTO, "Accession in perspective", sebagaimana dimuat dalam [WTO | Handbook on Accession to the WTO - CBT - Accession in perspective - Page 1](#), diakses pada 3 November 2023.

² Peter van den Bossche, et.al, (2010), *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 15.

³ Hata, (2016), *Hukum Ekonomi Internasional: IMF, World Bank, WTO*, Satara Press, Malang, hal. 125.

terkait dengan aspek perdagangan. Terutama perdagangan barang selain jenis perdagangan lainnya seperti jasa dan sebagainya. Untuk perdagangan barang, itu melibatkan proses dalam manajemen rantai pasokan global secara bertahap. Juga, Aturan termasuk untuk setiap jenis barang yang dapat diekspor atau diimpor dalam anggota. Aturan-aturan penting harus seperti Sanitasi dan Phytosanitary (*Sanitary and Phytosanitary Measures/ SPS*) dan hambatan teknis untuk perdagangan (*Technical Barrier to Trade/ TBT*). SPS menetapkan bahwa barang termasuk bentuk kebersihan hewan dan tumbuhan. Anggota harus memastikan bahwa produk bebas dari bahaya seperti parasit dan sebagainya. Kemudian, barang-barang yang telah sepenuhnya mematuhi aturan SPS akan disertai dengan TBT yang menyediakan anggota untuk memutuskan kriteria untuk produk yang diimpor. TBT memungkinkan pembuatan kebijakan tentang standar, proses evaluasi, dan peraturan teknis.⁴

Secara historis, dunia perdagangan telah melampaui banyak masalah kesehatan, misalnya: SARS, H1N1, Ebola, dan Covid-19.⁵ Namun, hanya SARS yang tidak dianggap pandemi menurut WTO. Pandemi awal adalah H1N1, yang pertama kali muncul di Meksiko telah mempengaruhi produk hewan hidup atau olahan seperti komoditas Babi. Sebagian besar anggota melarang aktivitas impor mereka tidak hanya dari Meksiko. Ini menghasilkan tindakan perdagangan yang secara umum melarang perdagangan produk hewan oleh anggota pada saat yang sama dan secara kolektif.⁶

Pandemi kedua adalah Ebola yang awalnya pecah secara regional di negara-negara Afrika. Pandemi ini memiliki kesamaan dengan H1N1, yang menginfeksi melalui hewan, dalam hal ini, primata kepada manusia. Namun, perbedaan antara keduanya adalah Ebola hanya terjadi pada skala regional dan tidak menyebar ke benua lain.⁷ Sama seperti H1N1, Ebola telah memberikan dampak pada perdagangan global. Setiap anggota pada akhirnya mengambil tindakan untuk menanggapi pandemi. Sejumlah tindakan telah diberlakukan selama periode tersebut. Tetapi itu tidak mencegah anggota dari membantu

⁴ WTO, (2005), *Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 11.

⁵ Tim K. Mackey and Bryan A. Liang, (2011), "Lesson from Sars and H1N1/A: Employing a WHO-WTO Forum to Promote Optimal Economic-Public Health Pandemic Response", *Journal of Public Health Policy*, hal. 121.

⁶ WTO, (2009), "Members Discuss Trade Responses To H1N1 Flu". Sebagaimana dimuat dalam [WTO | 2009 News items - Members discuss trade responses to H1N1 flu](#), diakses pada 3 Mei 2023.

⁷ James Jay Carafano, (2015), "The Ebola Outbreak of 2013-2014: An Assessment of U.S. Actions", The Heritage Foundation, Washington, sebagaimana dimuat dalam [heritage.org/homeland-security/report/the-ebola-outbreak-2013-2014-assessment-us-actions](#), diakses pada 3 Mei 2023, hal. 7.

anggota yang terinfeksi secara independen atau bersama-sama pada skala multilateral yang dilayani oleh WTO.⁸

Akhirnya, wabah yang telah berlangsung awalnya pada 19 Desember 2019 di Wuhan, China. Wabah diidentifikasi sebagai kasus gejala pneumonia menurut laporan WHO yang akhirnya dinyatakan sebagai Covid-19.⁹ Covid-19 juga menular melalui hewan. Ini telah mempengaruhi perdagangan karena China adalah negara terkemuka yang berkontribusi pada rantai distribusi barang dan jasa. WTO mengatakan bahwa “*The COVID-19 pandemic represents an unprecedented disruption to the global economy and world trade, as production and consumption are scaled back across the globe*”.¹⁰ Kemudian, anggota menanggapi dengan memberlakukan tindakan unilateral tidak hanya untuk produk yang diimpor berasal dari China tetapi juga melarang dan menahan ekspor mereka untuk mempertahankan kebutuhan domestik.

Namun demikian, tindakan perdagangan yang dilakukan setiap anggota WTO telah memberikan masalah besar satu sama lain untuk pertumbuhan ekonomi mereka atas komoditas yang berasal dari impor. Tindakan unilateral kolektif membuka pintu gerbang bagi anggota untuk menerapkan kebijaksanaan mengenai prinsip-prinsip pencegahan yang ada pada aturan setiap anggota memiliki penafsiran yang berbeda. Karena tindakan unilateral terjadi secara bersamaan, WTO tidak melarang dan menentukan apakah itu tidak dapat dilakukan oleh anggota. Bahkan, WTO mengumumkan anggota untuk menginformasikan tindakan yang ada karena alasan anggota dapat mengetahui satu sama lain. Ini mengkonfirmasi tindakan yang diambil oleh anggota dimungkinkan meskipun melanggar akses pasar.¹¹

Selain itu, tindakan yang dilakukan anggota adalah bersifat sementara atas respon terhadap pandemi Covid-19. Anggota biasanya menganulir tindakan perdagangan tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka kembali terhadap WTO ketika pandemi Covid-19 berakhir. Namun, tindakan semacam ini muncul sebagai bukti jika anggota siap untuk membuka akses pasar mereka kembali ke perdagangan. Ini membuat perdagangan

⁸ Mercy Corps, (2019), “Chapter 4: How Does Ebola Affect the Economy?”, sebagaimana dimuat dalam [Chapter 4: How does Ebola affect the economy? | Mercy Corps](#), diakses pada 5 Mei 2023.

⁹ WHO, (2020), “Archived: WHO Timeline - Covid-19”, sebagaimana dimuat dalam [Archived: WHO Timeline - COVID-19](#), diakses pada 10 November 2023.

¹⁰ WTO, (2020), “COVID-19 and World Trade”, sebagaimana dimuat dalam [WTO | COVID-19 and world trade](#), di akses pada 15 November 2023.

¹¹ Ilona Cheyne, (2007), “Gateways to the Precautionary Principle in WTO Law”, *Journal of Environmental Law*, 19(2), hal. 160.

multilateral berjalan seperti biasa serta dengan masalah umum mereka, misalnya, hambatan perdagangan reguler yang dikenakan oleh anggota dalam kasus tertentu. Namun, tidak ada pembaruan untuk memperkuat sistem yang dimulai oleh anggota atau WTO itu sendiri. Selain itu, Peraturan berisi serangkaian aturan yang dapat menjadi pintu masuk untuk perdagangan pasca-pandemi atau pengaturan untuk masalah kesehatan yang akan datang. Jelas, berdasarkan pengalaman sebelumnya yang diberikan oleh anggota, mereka harus mulai memperhatikan strategi lain yang mungkin untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi resilien atau mengembangkan kebutuhan domestik.¹² Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan secara menyeluruh membahas bagaimana anggota mematuhi kewajiban selama Covid-19 dengan memberlakukan tindakan perdagangan; dan bagaimana tindakan unilateral dapat memperkuat sistem dan menciptakan liberalisasi perdagangan pada tahap berikutnya. Juga, Artikel ini akan memberikan gagasan konseptual yang mungkin dapat diterapkan kepada anggota untuk tujuan memperkuat sistem sesuai dengan aturan yang ada di WTO.

B. METODOLOGI

Artikel ini akan ditulis dengan metode yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan historis ketika masalah kesehatan telah terjadi dan bagaimana anggota dan WTO yang memengaruhi perdagangan internasional.¹³ Namun, analisis atau diskusi akan difokuskan pada Covid-19 berdasarkan alasan bahwa masalah kesehatan sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal efek dan tanggapan terhadap perdagangan yang diambil oleh anggota. Setelah itu, sementara pembahasan sudah selesai, artikel ini akan memberikan ide konseptual yang mungkin dapat diambil oleh anggota atau WTO secara umum untuk memperkuat sistem atau mempersiapkan diri untuk masalah kesehatan nanti yang mungkin terjadi. Artikel ini menggunakan data sekunder yang sebagian besar berasal dari aturan hukum WTO dan perkembangan mereka, seperti *annex* tambahan, kebijakan, undang-undang, dan statistik.¹⁴ Semua sumber akan dianalisis sesuai dengan metode kualitatif, yang menghasilkan jawaban yang rasional dan konseptual untuk

¹² UN CDP, (2020), "Development Policy and Multilateralism after Covid-19", sebagaimana dimuat dalam [CDP-Covid-19-and-Multilateralism.pdf \(un.org\)](#), diakses pada 20 November 2023.

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, hal. 35.

¹⁴ Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hal. 53.

perdagangan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan.¹⁵ Oleh karena itu, artikel ini akan memenuhi tujuan penelitian yang disebutkan di atas.

C. PEMBAHASAN

1. Anggota Yang Memenuhi Kewajiban Selama Masalah Kesehatan Dengan Memberlakukan Tindakan Perdagangan

Sebagai proses yang berkelanjutan, perdagangan diharapkan bertujuan untuk keuntungan ekonomi. Dengan berdagang satu sama lain, anggota tentu saja menghendaki tujuan ekonomi mereka terpenuhi. Hal ini dikarenakan, anggota mencoba untuk memenuhi konsumsi mereka di mana tidak dapat diproduksi secara domestik. Pada umumnya juga, anggota mencoba untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Jumlah perdagangan antara anggota yang surplus acapkali dianggap sebagai bukti tujuan ekonomi mereka telah dicapai. Di sisi lain, bagi mereka yang jelas tidak dapat mempertahankan konsumsi mereka akan bergantung pada barang yang diimpor, terlepas dari apakah itu akan mempengaruhi ekonomi pada skala domestik.¹⁶

WTO didirikan untuk memastikan tujuan ekonomi setiap anggota dapat difasilitasi. Dengan aturan, WTO dapat memenuhi kebutuhan anggota untuk perdagangan multilateral atau yang bersifat lebih luas lagi. Sistem yang disusun oleh anggota sebagai konsensus harus dipertahankan terlepas dari ideologi politik mereka. John H. Jackson¹⁷, pernah mempertanyakan bagaimana anggota menerapkan aturan perdagangan yang ada di WTO, terutama GATT, yang mengatur perdagangan barang di dalam negeri yang dikenal sebagai tindakan perdagangan. Kewajiban untuk membebaskan perdagangan dengan membuka akses pasar kadang-kadang menjadi lebih sulit ketika dihadapkan dengan proteksi. Namun, selalu dapat diselesaikan dengan mengikuti tindakan dalam prosedur WTO.

Dalam skema tertentu, jarang sistem juga dapat terhalang oleh masalah tertentu yang mempengaruhi anggota bersama-sama. Saat ini, Covid-19 telah dinyatakan sebagai masalah kesehatan yang telah berlangsung yang memengaruhi perdagangan anggota WTO. Anggota memberlakukan sejumlah tindakan perdagangan yang berdampak pada

¹⁵ Amir Hamzah, (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*, Literasi Nusantara, Malang, hal. 46.

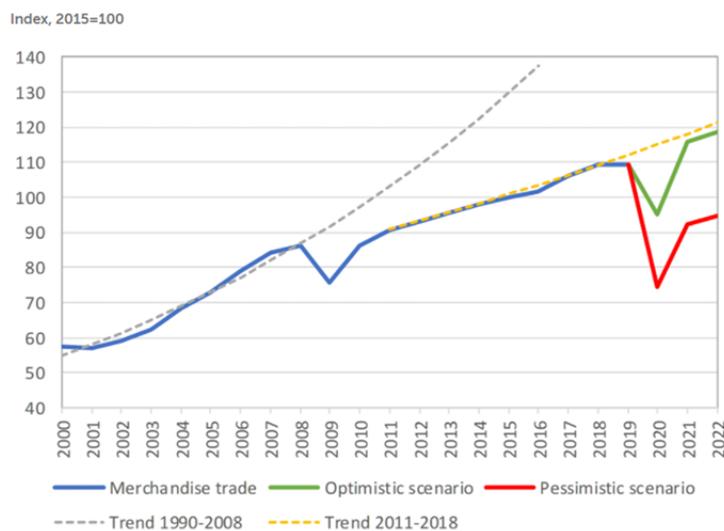
¹⁶ Olivier Blanchard (2017), *Macroeconomics*, Pearson, Edinburgh, hal. 257.

¹⁷ Mitsuo Matsushita, (2016), Book Review-Implementing International Trade Agreements in Domestic Jurisdictions, *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, hal. 356.

rantai pasokan global, terutama perdagangan barang. Banyak dari mereka tidak hanya melarang impor produk dari Cina, di manakhusus ini awalnya. Tindakan diambil berdasarkan pendekatan responsif dengan asumsi pencegahan jika Covid-19 mungkin ditularkan tidak hanya dari manusia atau hewan. Barang yang diproses dengan melibatkan interaksi manusia juga dianggap dapat menularkan Covid-19. Selain itu, Covid-19 juga mendorong anggota untuk memberlakukan tindakan yang melarang barang-barang domestik diekspor. Anggota mengamankan kepentingan nasional mereka dengan menyimpan barang-barang untuk konsumsi domestik bahkan jika itu membahayakan ekspor mereka.

WTO menanggapi dengan menyajikan laporan dan konferensi pers dari Direktur Jenderal WTO sebelumnya, Roberto Azevedo¹⁸ yang menyatakan pada 8 April bahwa *"This crisis is first and foremost a health crisis which has forced governments to take unprecedented measures to protect people's lives"*. Selain itu, WTO mengklaim akan ada dampak langsung sehubungan dengan perdagangan barang yang terpengaruh. Dia menyebutkan jika *"these numbers are ugly – there is no getting around that. But a rapid, vigorous rebound is possible. Decisions taken now will determine the future shape of the recovery and global growth prospects. We need to lay the foundations for a strong, sustained and socially inclusive recovery"*.

Chart 1 - World merchandise trade volume, 2000-2022



Tabel 01: Proyeksi Neraca Perdagangan Anggota WTO

¹⁸ WTO, (2020), “Trade Set to Plunge as COVID-19 Pandemic Upends Global Economy”, sebagaimana dimuat dalam [WTO | 2020 Press Releases - Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy - Press/855](#), diakses pada 20 November 2023.

Berdasarkan grafik di atas¹⁹, WTO memprediksi bagaimana pandemi yang telah terjadi pada tahun 2020 lalu dan memberikan simulasi atas dua skenario tentang bagaimana perekonomian akan pulih sesuai dengan perdagangan barang. Berbicara tentang skenario pesimis, WTO memperkirakan jika pemulihan ekonomi tetap rendah karena dua pertiga anggota dikategorikan sebagai negara berkembang dan negara miskin yang bergantung pada produk impor. Mereka mengalami penurunan ekonomi karena larangan impor. Sebaliknya, skenario optimis menawarkan harapan yang menjanjikan bagi anggota untuk pemulihan ekonomi negara anggota yang lebih cepat. Tampaknya muncul di tengah pandemi saat anggota memutuskan untuk melonggarkan tindakan perdagangan untuk membuka kembali akses pasar. Selain itu, anggota yang dianggap berhasil menangani Covid-19 di dalam negeri diharapkan untuk mendukung negara lain dengan membuka kembali akses pasar yang dapat menguntungkan setiap pihak.

Akses pasar sebagai kewajiban utama, yang wajib menurut WTO dengan memastikan apakah perdagangan akan berjalan secara liberal. Aturan tersebut terkandung dalam Pasal II GATT 1994, dengan ketentuan setelah anggota menetapkan jadual komitmen (*Schedule of Concession/ SOC*) mereka untuk membebaskan perdagangan, tidak boleh ada tindakan perdagangan yang dikenakan oleh anggota kecuali tarif. Oleh karena itu, tindakan non-tarif umumnya dilarang. Pembatasan juga ditetapkan oleh GATT 1947 pada Pasal 8 sampai 13 untuk tindakan seperti biaya dan formalitas, lisensi impor, dan sebagainya. Bahkan WTO melarang anggota, selama Covid-19, anggota terus memaksanya. Sayangnya, WTO tidak menyediakan aturan untuk menangani tindakan kolektif yang diambil oleh anggota sebagai tanggapan terhadap wabah Covid-19.

Bahkan, tindakan yang diambil oleh anggota melanggar kewajiban mereka untuk memberikan akses pasar, serta dianggap berdasarkan tindakan pencegahan untuk mencegah Covid-19 mulai menyebar ke wilayah tersebut. Bahkan itu tidak didasarkan pada bukti ilmiah atau fakta karena, selama waktu itu, Covid-19 masih tidak dapat ditentukan oleh pihak yang berkompeten, misalnya, WHO. Setiap anggota telah bersaing dengan orang lain dengan memberlakukan tindakan unilateral semasa Covid-19 hanya untuk memastikan kepentingan nasional mereka akan aman.

Selain itu, anggota membantah apakah tindakan yang diambil sesuai dengan Pasal XX dari GATT 1994, yang menetapkan kemungkinan untuk membatasi perdagangan jika

¹⁹ *Ibid.*,

itu berkaitan dengan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian, anggota menghubungkan tindakan perdagangan yang mereka lakukan sebagai bagian dari perjanjian SPS dan TBT. SPS, umumnya memberikan aturan sesuai dengan perlindungan manusia dan sebagainya berdasarkan bukti ilmiah. Para anggota juga diminta untuk sepenuhnya mempertimbangkan tindakan awal sebelum tindakan diambil. Ini berarti sebelum tindakan diberlakukan, anggota diminta untuk memastikan bukti ilmiah dengan mempertimbangkan tindakan perdagangan tersebut sebelum akan diterbitkan, yang mempengaruhi perdagangan.²⁰ Mengenai bukti ilmiah, Perjanjian SPS dan WTO tidak memberikan atau menjelaskan apa yang seharusnya. Pasal 5.1 diatur jika tindakan diambil, harus merujuk pada standar yang relevan yang dikembangkan oleh organisasi internasional lainnya, dalam hal ini WHO dan FAO, karena WTO bukanlah organisasi yang tidak menyediakan standar untuk setiap aturan.

Kemudian, aturan lain yang dapat dimasukkan ke dalam tindakan harus menjadi Perjanjian TBT. Ini selalu menjadi bagian dari SPS. Jika SPS utama berkaitan dengan melindungi manusia, hewan, dan sebagainya. TBT dapat menjadi alasan mengapa harus diambil berdasarkan tujuan sah anggota. Tujuan yang sah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mengambil tindakan jika secara langsung memenuhi kepentingan nasional, pencegahan praktik penipuan, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian TBT.²¹ Secara hukum, WTO mengakui hak anggota untuk menerapkan tindakan berdasarkan tujuan yang sah. Hal ini juga menghubungkan dengan Pasal XX dari GATT sebagai pengecualian umum untuk mengambil tindakan secara kebetulan terhadap Perjanjian SPS.²²

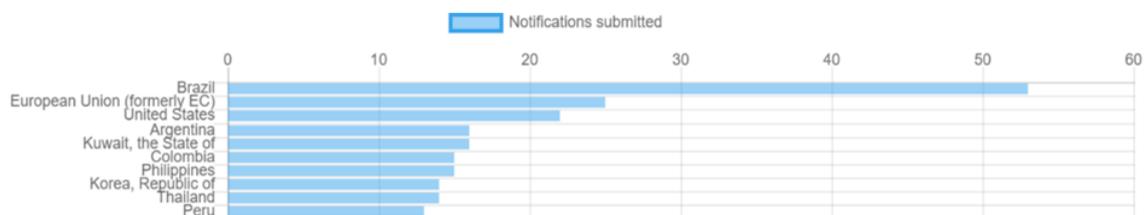
WTO tampaknya tidak memiliki sikap yang terhadap penafsiran dan tindakan perdagangan yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Memang, berdasarkan notifikasi pertama mereka untuk merespon Covid-19, memfasilitasi anggota untuk memberlakukan tindakan perdagangan, tetapi mereka diminta untuk melaporkannya ke WTO untuk tujuan

²⁰ WTO, (2021), “Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures”, sebagaimana dimuat dalam [WTO | Understanding the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement](#), diakses pada 25 November 2023.

²¹ Robert Howse and Philip I. Levy, (2013), “The TBT Panels: US-Cloves, US-Tuna, US-COOL”, *World Trade Review*, 13(2), hal. 355.

²² WTO, (2021), “Technical Barriers to Trade” sebagaimana dimuat dalam [WTO | Technical Barriers to Trade](#), diakses pada 25 November 2023.

anggota lain dapat mengetahui ketika ingin mengekspor barang. Menurut catatan informasi WTO, ia menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil dengan tindakan tidak berlaku untuk semua barang. Secara khusus, itu hanya berlaku untuk produk yang dikategorikan sebagai makanan, produk penting lainnya, atau persediaan medis. Untuk rincian lebih lanjut, itu menyatakan, “*the products covered by these [restriction]...most have focused on medical supplies...to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs, or other essential products. Rules also contain more general exceptions, which could be used to justify restrictions provided that they do not constitute a means of arbitrary or justifiable discrimination between countries, or a disguised restriction on international trade*”.²³



Tabel 02 Notifikasi Anggota WTO

Menurut notifikasi anggota WTO tentang Covid-19, pada tanggal 6 Mei 2021, anggota telah mengajukan total 363 pemberita. Berdasarkan grafik di atas, sebagai sepuluh anggota teratas dalam daftar, Brasil berkontribusi 53 tindakan perdagangan yang dikenakan dan dilaporkan ke database WTO. Ini menjadi dua kali dibandingkan dengan Uni Eropa atau Amerika Serikat dengan hanya 25 dan 22 dan diikuti secara berurutan oleh anggota lain dengan hanya kurang dari 20 tindakan perdagangan.

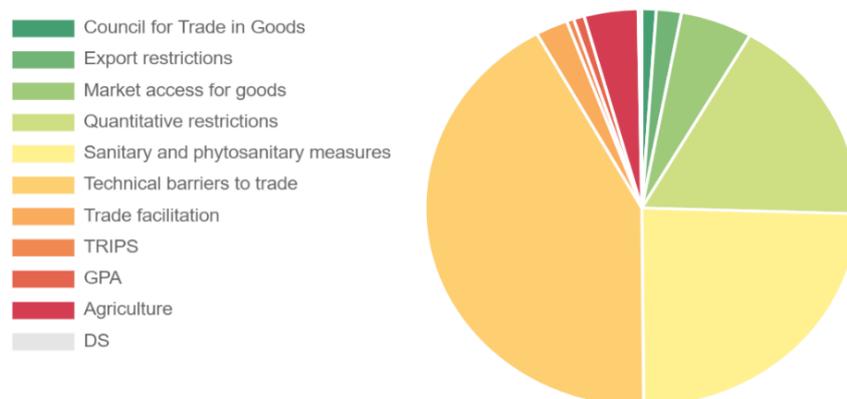


Chart 01 Notifikasi Tindakan Perdagangan Anggota WTO

²³ WTO, (2020), “Export Prohibitions and Restrictions: Information Note”, sebagaimana dimuat dalam [export_prohibitions_report_e.pdf \(wto.org\)](https://www.wto.org/trade_restriction_monitoring/export_prohibitions_report_e.pdf), diakses pada 30 November 2023.

Kemudian, TBT sebagai sebagian besar aturan praktis yang dikenakan oleh anggota dengan 157 tindakan perdagangan. Hampir setengah dari mereka, terutama SPS, yang seharusnya menjadi alasan utama mengapa anggota memaksanya hanya 91. Dan sisanya adalah akses pasar untuk barang dengan 64 dan seterusnya dengan kurang dari 20 tindakan perdagangan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa anggota responsif dan sementara menciptakan tindakan dalam tindakan dengan tergesa-gesa. Menurut database, setengah dari mereka dipaksakan dan dilaporkan ke Sekretariat WTO dalam bulan pertama pidato WTO oleh Direktur Jenderal, yang terjadi pada bulan Maret. Jumlah tindakan mulai meningkat dengan cepat pada bulan berikutnya. Terlepas dari itu, apakah itu sesuai dengan persyaratan akan dipertimbangkan nanti karena masing-masing anggota yakin jika yang lain akan tampil secara bersamaan.

2. Tindakan Unilateral untuk Memperkuat Sistem Perdagangan Multilateral

Tentu saja, Peraturan menyediakan sistem perdagangan multilateral yang komprehensif dan perdagangan konservatif akan dibebaskan. Sebagai kesepakatan, Aturan harus dipertahankan dengan niat baik. Sumaryo Suryokusumo pernah menyatakan bahwa [adalah penting bagi anggota untuk melaksanakan keyakinan mereka terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian sebagai sumber hukum internasional].²⁴ Selain itu, perjanjian tentang WTO sebagai alasan mengapa ia didirikan dibuat oleh konsensus anggota-anggota dan dikategorikan sebagai hukum internasional publik. Sejak WTO didirikan oleh aturan, ia bekerja secara langsung sebagai organisasi internasional dan untuk semua anggota yang mendapat manfaat dari itu.²⁵

Aturan dapat berjalan sendiri karena hanya berisi norma. Anggota berkomitmen untuk menerapkannya ke dalam peraturan domestik mereka terlepas dari konsep umum mereka atau penerapan hukum internasional. Pada skala yang lebih luas, implementasi umum dari Aturan entah bagaimana akan tergantung pada bagaimana ekonomi dan politik dijalankan oleh anggota. Mungkin akrab jika anggota menunda kewajiban mereka karena fluktuasi ekonomi. Namun, peristiwa ekonomi dapat dimengerti oleh orang lain atau bahkan WTO. Tetapi jika itu mengambil pertimbangan politik, terutama pembatasan proteksi yang diterapkan oleh anggota, itu harus mempengaruhi perdagangan global

²⁴ Sumaryo Suryokusumo, (2008), *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, hal. 8.

²⁵ Sri Setianingsih Suwardi, (2004), *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, hal. 85.

bahkan jika itu hanya dilakukan oleh anggota tertentu, perang perdagangan antara China dan Amerika Serikat dapat dilihat secara keseluruhan.²⁶

Indikator apakah anggota mematuhi WTO dapat dilihat di yurisdiksi domestik. Jika Aturan dapat dicetak secara kualitatif, mayoritas anggota telah mematuhi aturan dalam skala perdagangan normal. Bahkan, entah bagaimana ada perselisihan, hanya melibatkan lebih sedikit anggota. Setelah klausa melarikan diri telah ditemukan, ia melakukan perdagangan secara normal. Berbicara tentang Covid-19, yang masih terjadi, tindakan unilateral sebagai bentuk utama untuk menerapkan Aturan mengambil peran mereka yang dominan. Anggota mempertimbangkan apakah itu adalah cara utama untuk mematuhi WTO, tetapi kadang-kadang juga sebagai klausa melarikan diri dari mengabaikan kewajiban. Tindakan yang diambil selama Covid-19 dianggap sebagai tindakan pencegahan dan melarikan diri karena wabah. Juga, itu harus valid sementara dan akan ditarik kembali secara bertahap tentang bagaimana Covid-19 akan disimpan.²⁷

Pada tahap berikutnya, ketika memprediksi masalah kesehatan dapat mempengaruhi perdagangan, diharapkan, anggota dan WTO diharapkan untuk melayani konsep yang diperlukan dan mungkin. Misalnya, sementara masalah kesehatan awalnya meletus, WTO harus mengkomunikasikan masalah dengan pihak terkait seperti WHO yang mewakili organisasi kesehatan internasional. Juga, WTO harus mengumpulkan informasi kepada anggota di mana masalah kesehatan pertama meletus dan membuat peta bagaimana itu mungkin mempengaruhi perdagangan. WTO segera melaporkan kepada semua anggota untuk mengatur pendekatan konsensus yang akan diterapkan secara domestik melalui tindakan unilateral yang diambil oleh anggota. Belajar dari Covid-19, WTO mengambil peran yang tampaknya lambat sementara anggota menanggapi dengan cepat dengan memberlakukan tindakan unilateral dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan nasional.

Sementara WTO perlahan-lahan menanggapi Covid-19 dengan bergantung pada WHO untuk memastikan informasi. Terlepas dari WTO dan WHO bahwa setiap negara bisa menjadi anggota dari kedua organisasi. Para anggota tidak memperhatikan mereka sebelum mengambil tindakan. Tampaknya anggota sementara tidak mempertahankan

²⁶ John H. Jackson, (2004), *Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 257.

²⁷ Mitsuo Matsushita, (2016), "Book Review-Implementing International Trade Agreements in Domestic Jurisdictions", *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, hal. 338.

organisasi internasional mereka untuk mereka. Itu adalah perasaan alami dari anggota untuk melanggar kewajiban bahkan pada skala reguler. Seperti yang disebutkan di atas, tindakan pencegahan mengambil kepemimpinan sebagai pertimbangan utama oleh anggota. Sementara Covid-19 tampaknya secara bertahap dikendalikan, anggota dengan kesadaran penuh menyangkalnya dengan mengambil tindakan unilateral untuk membuka kembali akses pasar.

Namun, tindakan yang diambil tidak selalu menghalangi perdagangan. Perlu dikonfirmasi apakah selama Covid-19 anggota telah memberlakukan tindakan yang membatasi perdagangan secara kolektif dan jumlah pemberitahuan masih meningkat. Tetapi penting untuk dipahami jika, selama tindakan yang diterapkan, anggota secara aktif menyesuaikannya secara bertahap. Terkadang, bahkan jumlah pemberitahuan di database WTO terus meningkat. Secara praktis, itu tidak lagi ada pada skala domestik - contoh diberikan ketika anggota telah melarang produsen untuk mengeksport persediaan medis karena kebutuhan nasional. Setelah anggota memastikan untuk memenuhi stok mereka, mereka telah mulai mengeksportnya dengan tujuan untuk mendapatkan kembali pasar mereka yang hilang. Juga, model tindakan yang diterapkan menjadi jaminan jika tindakan unilateral selama Covid-19 memiliki dua sisi untuk diakui.

Tindakan unilateral tidak hanya dapat dianggap sebagai hambatan perdagangan pada awalnya. Anggota juga mengambil tindakan unilateral untuk menanggapi Covid-19 sebagai tindakan antisipasif (*support measures*). Ini didefinisikan sebagai tindakan yang diambil dan diterapkan secara langsung hanya untuk tujuan domestik. Tindakan antisipatif juga berisi kebijakan yang tidak langsung diambil dengan mempertimbangkan aturan. Ini umumnya berlaku untuk bagaimana anggota membantu penduduk mereka untuk menjalani Covid-19. Tetapi, dalam beberapa keadaan, itu akan menguntungkan secara eksternal. Oleh karena itu, tindakan antisipatif tidak dimaksudkan untuk membatasi dan melarang perdagangan dengan anggota lain. Sejumlah tindakan perdagangan dukungan menurut database WTO mencatat dua setengah kali lebih banyak dari tindakan yang merujuk pada pembatasan perdagangan. Ini memiliki total 915 notifikasi, yang sebagian besar disumbangkan oleh anggota Uni Eropa. Terlepas dari itu, ia dianggap sebagai Uni atau setiap anggota Uni Eropa sebagai negara berdaulat.²⁸

²⁸ WTO, (2021), "Covid-19: Support Measures", sebagaimana dimuat dalam [WTO | COVID-19: Support Measures](#), diakses pada 30 November 2023.

Terakhir, tetapi tidak terkecuali, setelah dua jenis tindakan telah disebutkan di atas. Ada cara yang substansial untuk memperkuat sistem karena Covid-19 atau bahkan pasca-pandemi. Selama wabah, beberapa anggota mengajukan sejumlah proposal ke Sekretariat WTO untuk ditindaklanjuti. Proposal ini mencakup ide-ide anggota yang tampaknya kemungkinan akan diterapkan atau bahkan sudah diterapkan oleh anggota. Sementara tindakan diambil secara unilateral, sebuah proposal dapat diajukan ke WTO oleh satu anggota atau bahkan sekelompok anggota. Konteks dari proposal yang diajukan kemungkinan mendukung tindakan. Hal ini tidak dapat didasarkan pada Aturan tetapi murni untuk memastikan kontinuitas perdagangan selama atau setelah Covid-19. Seperti proposal terbaru yang disampaikan oleh sekelompok anggota yang terdiri dari Australia, Kanada, Chili, Kolombia, Selandia Baru, Norwegia, dan Turki.

Melalui proposal yang berjudul "*Enhancing the Role of the WTO in the Global Effort Toward the Production and Distribution of Covid-19 Vaccines and Other Medical Support*"²⁹, anggota mengusulkan WTO untuk memulai gerakan maju untuk menyensor anggota yang terlibat dalam distribusi vaksin global sebagai cara yang mungkin untuk meredakan covid-19. Bahkan proposal yang ditujukan hanya untuk tujuan medis. Tetapi, jika dapat diperoleh oleh anggota, itu dapat membuka kemungkinan penghalang perdagangan karena efek Covid-19 - kekhawatiran utama dari proposal yang dimulai oleh anggota hanya salah satu upaya untuk membuka kembali akses pasar mereka. Berdasarkan pertimbangan penuh, jika perdagangan melibatkan anggota secara keseluruhan sebagai sistem yang kompleks sebagai rantai pasokan global. Sistem-sistem yang dapat diperkuat hanya berasal dari ide unilateral oleh anggota yang akan dimasukkan pada skala multilateral. Bahkan itu diikuti oleh tindakan yang tampaknya menghalangi perdagangan.

Dalam hal proposal, hal itu sudah sesuai dengan Perjanjian Marrakesh yang mendirikan WTO itu sendiri. Tapi itu terbatas hanya dalam kasus perubahan perjanjian utama WTO. Dalam Pasal X (1-10), semua set proposal yang disebutkan untuk amandemen Peraturan. Hal ini dapat dikatakan jika proposal yang diajukan oleh anggota berdasarkan tanggapan mereka terhadap Covid-19. Sebuah proposal memiliki dua titik masuk utama. Yang pertama adalah untuk melepaskan kewajiban anggota ke WTO secara

²⁹ WTO, (2021), "Enhancing the Role of the World Trade Organization in the Global Effort Toward the Production and Distribution of Covid-19 Vaccines and Other Medical Products", sebagaimana dimuat dalam [directdoc.aspx \(wto.org\)](https://directdoc.aspx(wto.org)), diakses pada 5 Desember 2023.

sementara selama Covid-19, seperti mengabaikan beberapa aturan. Kedua, untuk meningkatkan gerakan bersama oleh anggota untuk membuka kembali perdagangan. Misalnya, Australia dan lainnya telah mengajukan proposal di atas. Akan tetapi, selama Covid-19, setiap proposal yang diajukan oleh anggota hanya menjadi pemberitahuan kepada WTO dan anggota. Hingga saat ini, tidak ada proposal yang harus diikuti bahkan WTO memiliki fungsi untuk itu. Setelah itu, tidak ada proses lebih lanjut untuk proposal. Anggota baru saja membuat gerakan mereka sendiri secara unilateral baik menerapkan tindakan yang menghalangi atau membuka kembali perdagangan. Entah bagaimana, tindakan bilateral atau kolektif disajikan terlepas dari apakah WTO menyebutkannya atau tidak. Dengan tujuan untuk memulihkan dampak ekonomi dari Covid-19 dan sebagainya.

D. KESIMPULAN

Anggota tampaknya memberlakukan tindakan responsif sebagai pencegahan akibat wabah Covid-19. Ini juga sementara diterapkan pada perdagangan berdasarkan tujuan kesehatan. Anggota memaksanya langsung ke aturan dengan sepenuhnya memperhatikan perjanjian SPS atau TBT sebagai aturan utama yang digunakan untuk pemberitahuan tindakan ke sekretariat WTO. Selanjutnya, semua tindakan perdagangan selalu terkait dengan Pasal XX sebagai pengecualian umum yang tidak akan pernah ditolak oleh anggota sementara itu akan diambil oleh anggota. Dalam kasus kurangnya aturan tentang tindakan kolektif, WTO membenarkannya bahkan jika melanggar prinsip akses pasar. Bahkan, anggota menerapkannya secara bersamaan, dan tidak ada anggota yang mengeluh tentang hal itu.

Anggota harus mematuhi aturan dengan baik dan membuktikan dengan tindakan dalam negeri yang dapat mempengaruhi perdagangan. Dalam perdagangan reguler, sementara anggota tampaknya bahwa tindakan menyiratkan perdagangan mereka. Ini dapat menyebabkan konflik tetapi hanya melibatkan lebih sedikit anggota. Kemudian dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur WTO. Karena Covid-19, anggota jelas menghalangi perdagangan dan tidak mematuhi aturan, terutama dalam barang. Tindakan unilateral tidak selalu tampaknya menghalangi perdagangan. Seiring waktu, awalnya, anggota juga dapat membuka kembali akses pasar mereka secara mandiri atau bersama dengan orang lain. Sebuah proposal yang diserahkan ke WTO dapat menjadi bukti tindakan yang telah dipertimbangkan sepenuhnya dan telah diimplementasikan oleh

anggota dalam negeri. Mudah-mudahan, jenis tindakan unilateral yang diambil oleh anggota dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem di mana priority tidak bekerja cukup baik untuk menanggapi pandemi apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah:

- Peter van den Bossche, et.al, (2010), Pengantar Hukum WTO, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hata, (2016), Hukum Ekonomi Internasional: IMF, World Bank, WTO, Satara Press, Malang.
- WTO, (2005), Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Cambridge University Press, Cambridge.
- Tim K. Mackey and Bryan A. Liang, (2011), Lesson from Sars and H1N1/A: Employing a WHO-WTO Forum to Promote Optimal Economic-Public Health Pandemic Response, *Journal of Public Health Policy*,33, page 119-130. doi:10.1057/jphp.2011.51.
- Ilona Cheyne, (2007), Gateways to the Precautionary Principle in WTO Law, *Journal of Environmental Law*, 19(2), page 155-172, doi 10.1093/jel/eq1036.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, (2016), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia, Depok.
- Sugiyono, (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung.
- Amir Hamzah, (2019), Metode Penelitian Kualitatif, Literasi Nusantara, Malang.
- Olivier Blanchard (2017), *Macroeconomics*, Pearson, Edinburgh.
- Robert Howse adn Philip I. Levy, (2013), The TBT Panels:US-Cloves, US-Tuna, US-COOL, *World Trade Revie*, 13(2), page 327-375, doi 10.1017/S1474745612000638.
- Sumaryo Suryokusumo, (2008), *Hukum Perjanian Internasional*, Tatanusa, Jakarta.
- Sri Setianingsih Suwardi, (2004), *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.
- John H. Jackson, (2004), *Soverignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mitsuo Matsushita, (2016), Book Review-Implementing International Trade Agreements in Domestic Jurisdictions, *Journal of International Economic Law*, Vol. 19, page. 355-358, doi: 10.1093/jiel/jgw020.

Internet:

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/cls1p1_e.htm#:~:text=Their%20membership%20of%20the%20WTO,99.35%20percent%20of%20world%20population.

WTO, (2021), Covid-19: Support Measures, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_support_measures_e.htm

WTO, (2021), Enhancing the Role of the World Trade Organization in the Global Effort Toward the Production and Distribution of Covid-19 Vaccines and Other Medical Products, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm#measures

WTO, (2021), Technical Barriers to Trade, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

WTO, (2020), Export Prohibitions and Restrictions: Information Note, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf

WTO, (2021), WTO Members's Notification on Covid-19, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm

WTO, (2020), Trade Set to Plunge as COVID-19 Pandemic Upends Global Economy, Available at https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

WTO, (2021), Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

UN CDP, (2020), Development Policy and Multilateralism after Covid-19, Available at <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/CDP-Covid-19-and-Multilateralism.pdf>

Mercy Corps, (2019), Chapter 4: How Does Ebola Affect the Economy?, Available at <https://www.mercycorps.org/blog/ebola-outbreaks-africa-guide/chapter-4>

WHO, (2020), Archived: WHO Timeline - Covid-19, Available at <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>

WTO, (2020), COVID-19 and World Trade, Available at https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm

WTO, (2009), Members discuss trade responses to H1N1 flu. Available at https://www.wto.org/english/news_e/news09_e/sps_25jun09_e.htm

James Jay Carafano, (2015), The Ebola Outbreak of 2013-2014: An Assessment of U.S. Actions, The Heritage Foundation, Washington, page 7, Available at <https://www.heritage.org/homeland-security/report/the-ebola-outbreak-2013-2014-assessment-us-actions>